

**HAMBATAN PENYIDIK POLRI ATAS PENANGANAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN YANG MENGGUNAKAN JASA PERBANKAN
(STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)**

Safitri Dwi Wulansari, Paham Triyoso, SH. MHum, Milda Istiqomah, SH. MTCP

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Safitridwiwulansari@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di Surabaya. Penipuan dengan menggunakan jasa perbankan merupakan bentuk modus-modus baru dalam tindak pidana penipuan. Penanganan tindak pidana penipuan dengan menggunakan jasa perbankan dalam praktiknya mengalami beberapa hambatan. Hambatan utama tersebut berasal dari pihak perbankan yaitu birokrasi perbankan, keamanan perbankan dan tidak adanya tenaga ahli teknologi di Polrestabes Surabaya. Hambatan-hambatan diatas telah diatasi dengan melakukan beberapa upaya yaitu upaya ilegal, sosialisasi dan belajar secara langsung mengenai teknologi. Selain itu pihak bank sendiri telah melakukan upaya dalam membantu penyidik yaitu upaya reprsif dan upaya preventif.

Kata kunci : Hambatan, Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan, Upaya.

Abstract

Criminal acts of fraud that uses the banking services is one of the crimes that happen often in Surabaya. Deception by using banking services is a new modus-modus in a criminal offense fraud. Handling the criminal act of deception by using banking services in practice experiencing some barriers. The main obstacle comes from banking authorities, namely the banking bureaucracy, banking security and the absence of technology experts at Polrestabes. Constraints on have been overcome by doing some effort efforts, which is illegal socialization and learn directly on technology. Besides the bank themselves have been doing an effort to assist in efforts to investigators namely. reprsif and preventive measures.

Keywords : The barrier, The criminal act of deception that uses banking services, effort.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian global yang demikian pesatnya menuntut inovasi kecepatan transaksi yang lebih *realtime*, cepat dan aman. Perekonomian yang pesat merupakan dampak dari arus perdagangan baik di bidang perindustrian maupun *commodity* yang begitu cepat. Pertumbuhan ekonomi dan arus perdagangan pada dasarnya harus berbanding lurus dengan adanya fasilitas yang memadai. Tuntutan transaksi secara regional dan Internasional membuat para lembaga yang turut serta berperan didalamnya memutar otak agar transaksi tersebut tidak tersendat. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi faktor penting atas berjalannya suatu transaksi. Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan suatu posisi yang strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas jarak, waktu yang dapat berdampak pada peningkatan efisiensi dan produktivitas.¹

Lembaga Negara turut serta dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas harus lebih bekerja keras agar tidak tersendatnya setiap proses dalam transaksi. Alat pembayaran atau uang merupakan bagian penting pada setiap transaksi. Bank berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berbagai jasa yang diciptakan oleh perbankan seolah ingin berusaha memenuhi apapun yang menjadi kebutuhan dan harapan nasabahnya ternyata menjadi perhatian dan incaran oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kelemahan jasa tersebut. Dalam kasus-kasus yang sering terjadi saat ini, jasa perbankan sering kali menjadi sarana kejahatan. Pengiriman uang yang saat ini hanya dengan menggunakan bantuan mesin ATM dan kartu debit, seseorang sudah dapat

¹Siswanto Sunarso,., Hukum **Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Prita Mulyasari**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hal. 39

mengirimkan uang kepada seseorang yang ingin dikirimnya. Namun dalam praktiknya, pengiriman uang mendominasi sebagai jasa perbankan yang digunakan sebagai sarana tindak pidana terlebih dalam tindak pidana penipuan.

Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohogan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

Penipuan yang seringkali terjadi dalam masyarakat adalah penipuan dengan modus perjanjian jual beli antar pelaku dan korban, dimana pelaku dan korban saling mengenal dan ada pertemuan langsung diantara keduanya. Namun dalam perkembangan jaman adanya jasa perbankan, penipuan tidak harus terjadi dengan adanya pertemuan dan saling mengenalnya antara pelaku dan korban, yaitu adanya tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan dimana jasa perbankan dijadikan sarana kejahatannya. Modus-modus yang sering digunakan pelaku atas tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan adalah modus penipuan online, penipuan via telepon dengan sasaran keluarga yang tersangkut hukum dan penipuan lainnya.

Penanganan atas tindak pidana pada tahap penyidikan dilaksanakan oleh penyidik. Penyidikan dalam Pasal 1 Ayat 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Pada dasarnya penanganan untuk tindak pidana penipuan pada umumnya dengan penipuan yang menggunakan jasa perbankan tidaklah berbeda. Namun dalam praktiknya penanganan pada penipuan biasa lebih mudah jika dibandingkan penipuan menggunakan jasa perbankan. Penyidik yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangkanya dalam praktik banyak menemui hambatan. Hasil data pra survey di Polrestaes Surabaya pada tahun 2012 ada sekitar 158 laporan masuk terkait tindak pidana khususnya

penipuan yang menggunakan jasa perbankan. Dari 158 laporan yang masuk yang dapat diselesaikan oleh pihak penyidik polrestabes hanya sekitar 96 kasus saja atau 59% total laporan yang masuk sementara sekitar 41 % dari laporan tersebut belum dapat diselesaikan.

Jasa perbankan yang merupakan fasilitas dari perbankan mempunyai suatu aturan berupa rahasia bank dimana rahasia bank berdasarkan Pasal 1 ayat 28 UU perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Nasabah sebagai pemilik rekening bank mempunyai hak untuk dilindungi identitasnya yang dimana dapat diartikan tidak sembarang orang dapat mengetahui identitas dari setiap pemilik rekening bank tersebut. Proses untuk membuka rahasia bank tersebut tidak lah mudah. Butuh sekitar waktu 2 minggu untuk meminta izin dari pihak bank Indonesia untuk membuka rahasia bank tersebut. Waktu 2 minggu merupakan waktu yang cukup lama dalam proses penyidikan terlebih terkait rahasia bank tersebut adalah untuk mendapatkan identitas pelaku dari tindak pidana ini. Namun hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian tidak berhenti sampai tahap itu saja. Setelah penyidik berhasil mendapatkan identitas dari pemilik rekening, polisi mendapat kendala berupa identitas pemilik rekening yang palsu. Identitas yang dimiliki oleh bank didapatkan dari syarat-syarat pembuatan rekening berupa KTP, NPWP dan keterangan domisili jika orang tersebut membuka rekening di luar kota KTP. Diawali dengan membuat sebuah KTP palsu dalam jumlah banyak pelaku sudah dapat membuat sebuah rekening bank. Pegawai bank dalam praktiknya cenderung tidak memeriksa keaslian dari KTP tersebut. Artinya, sistem keamanan dari pihak bank dalam mengawasi pembuatan rekening bank juga merupakan salah satu penghambat penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan yang penyidik memang membenarkan adanya hambatan-hambatan tersebut. Terutama menggunakan jasa perbankan. Berdasarkan hasil pra survey di Polrestabes Surabaya, hambatan yang timbul dari pihak bank itu sendiri

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perumusan masalah sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

- a. Apa hambatan dan upaya dari pihak penyidik dalam penanganan tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan ?

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hambatan Dan Upaya Penyidik Polrestaes Surabaya Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan

a. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan

Pada awalnya tindak pidana penipuan dengan menggunakan jasa perbankan ini berawal dari tindak pidana penipuan biasa. Tindak pidana penipuan biasa yang biasa terjadi adalah adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak. Namun teknologi yang tidak ada batasnya membuat sebagian orang mempelajari nya untuk hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif tersebut lalu dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Sebagian besar masyarakat menggunakan jasa perbankan, tidak dapat dipungkiri jasa perbankan memang mempermudah seseorang dalam bertransaksi. Transaksi dengan menggunakan jasa perbankan dapat terjangkau hingga luar negeri. Dengan menggunakan jasa perbankan seseorang tidak perlu melakukan pertemuan langsung dalam hal membuat kesepakatan atas obyek dan dalam hal pembayaran. *Transfer* yang merupakan jasa perbankan berupa pengiriman dapat mengirim pembayaran tanpa penjual dan pembelinya bertemu. Tidak adanya pertemuan langsung diantara keduanya merupakan celah untuk sebagian orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana. Teori diatas mengatakan bahwa kejahatan dapat dipelajari dengan sebuah teknik kejahatan dan alasan-alasan pendukung melakukan

perbuatan kejahatan. Teknologi merupakan salah satu alasan atau alat pendukung untuk seseorang melakukan kejahatan. Hal tersebut dibenarkan oleh AKP Agung Pribadi yang menyatakan perkembangan teknologi salah satu penyebab terjadi tindak pidana penipuan menggunakan jasa perbankan ini, sebagai contoh internet merupakan media yang banyak akan informasi yang dimana dengan mudah seseorang dapat memperoleh informasi melalui internet.²

Faktor kedua penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan yang diungkapkan oleh AKP Agung Pribadi adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang dimaksud oleh AKP Agung Pribadi bukan hanya berlaku untuk ekonomi kelas bawah, namun berlaku juga untuk perekonomian kelas menengah.

b. Modus Operandi Dan Kasus Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan

Kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan jasa perbankan ini dilakukan dengan berbagai macam modus operandi. Menyamar sebagai pejabat kepolisian, hadiah undian dari operator seluler, berbelanja melalui media internet, berpacaran melalui sosial media seperti Facebook.³

Kasus Ashok Madualeng, dalam kasus ini modus yang digunakan adalah penipuan via telepon. Kasus ini terdiri dari suatu kelompok dimana kelompok-kelompok ini menggunakan via telepon sebagai media dengan modus yang berbeda-beda. Modus dengan menyamar sebagai makelar kasus dengan korban keluar dari seseorang yang tersangkut oleh kasus hukum.

Kasus kedua yang terjadi adalah penipuan online dengan modus menang undian *blackberry*. Kasus ini terjadi di Surabaya

² Hasil wawancara dengan AKP Agung Pribadi, 07 Oktober 2013.

³ Hasil wawancara dengan AKP Agung pribadi tanggal 7 Oktober 2013

yang dimana korban bernama Agustinus Winaryanto. Bapak Agustinus ini telah tertipu undian dari PT RIM yang tersebar melalui broadcast BBM.⁴

Modus-modus yang digunakan oleh para pelaku rata-rata memanfaatkan media elektronik sebagai alat kejahatannya dan transfer uang sebagai sarana pembayarannya.

c. Situasi Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan Tahun 2012-2013

Berdasarkan keseluruhan laporan masuk tahun 2012-2013, laporan masuk di Polrestabes Surabaya sekitar 10,264 kasus dan untuk laporan yang dapat diselesaikan sebanyak 8,252 kasus. Masing-masing untuk laporan masuk pada tahun 2012 adalah 4852 dan dapat diselesaikan 3843, yang dimana pada tahun 2013 meningkat sebesar 527 kasus.

Selanjutnya untuk tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan tahun 2012 hanya sekitar 158 kasus dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 174 kasus. Namun, peningkatan yang terjadi ternyata seimbang dengan meningkatnya laporan yang dapat diselesaikan oleh penyidik Polrestabes Surabaya. Laporan selesai tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan pada tahun 2012 adalah 96 kasus dan untuk tahun 2013 yang dapat diselesaikan 139 kasus.

d. Hambatan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kesulitan yang dialami oleh penyidik adalah sebagai berikut :⁵

⁴ M. Taufik, **Awat, Penipuan Jual beli online dan undian blackberry (online)**, <http://www.surya.co.id>, (30 November 2013), 2013.

⁵ Hasil wawancara dengan AKP Agung Pribadi dan Brigpol Purwo Widodo, Tanggal 7 Oktober 2013

1) Faktor Birokrasi Perbankan

Birokrasi yang telah dibuat perbankan ternyata menjadi penghambat utama dalam proses penyidikan kepolisian.⁶ Sistem aturan perbankan yang terbilang rumit ditambah dalam praktiknya pejabat perbankan tidak sesuai dengan aturan yang ada membuat proses penyidikan terhambat. Dampak negatif dari birokrasi perbankan lainnya adalah pihak perbankan tidak menjadi kooperatif dalam membantu penanganan. Dibenarkan dengan keterangan dari AKP Agung pribadi bahwa “Bank tidak kooperatif dalam membantu penyidik menangani kasus. Bank hanya kooperatif jika kasus tersebut merugikan bank”.⁷ Tidak kooperatifnya bank jelas memperlambat proses penyidikan. Terlebih bank dalam kasus ini merupakan sarananya.

2) Faktor Keamanan Perbankan

Faktor kedua yang menghambat proses penyidikan adalah keamanan dari pihak perbankan. Syarat-syarat seorang nasabah untuk membuat sebuah rekening hanyalah Kartu Tanda Penduduk selanjutnya singkat KTP, NPWP (nomer pokok wajib pajak), dan keterangan domisili jika seseorang tersebut membuka rekening bank diluar domisilinya. Begitu mudahnya seseorang membuat sebuah rekening ternyata merupakan kelemahan perbankan itu sendiri.

Dalam praktiknya perbankan tidak memiliki alat untuk mendeteksi apakah KTP tersebut asli atau palsu. Perbankan dengan mudahnya percaya bahwa KTP yang digunakan oleh nasabah merupakan KTP aslinya. Keamanan dari pihak perbankan atas pembuatan rekening sesungguhnya menjadi pintu pembuka dalam mengurangi tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan.

3) Faktor kurangnya tenaga ahli teknologi

⁶ Hasil wawancara dengan AKP Agung pribadi tanggal 7 Oktober 2013

⁷ Hasil wawancara dengan AKP Agung pribadi tanggal 7 Oktober 2013

Faktor ketiga yang menjadi hambatan penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan adalah tidak adanya tenaga ahli teknologi di Polrestabes Surabaya. Modus-modus yang digunakan dalam tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan ini selalu menggunakan sarana IT. Modus penipuan via telepon, via BBM dan/atau SMS, penipuan jual beli online atau online shop dan sebagainya. Sarana dalam modus kejahatan diatas keseluruhannya menggunakan kecanggihan teknologi.

e. Upaya Penyidik Atas Hambatan dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan

Dalam setiap hambatan yang terjadi penyidik mengupayakan dengan beberapa cara. Upaya untuk hambatan pertama yaitu upaya birokrasi perbankan. Birokrasi yang merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah sesuai dengan jabatannya yang dimana dalam hal ini birokrasi perbankan adalah sistem perbankan yang harus dijalani oleh pejabat bank sesuai dengan jabatannya. Sistem yang terdiri atas aturan dan tata cara menyebabkan para pejabat bank kurang bisa membantu penyidik dalam menangani kasus tindak pidana. Dikarenakan tidak sejalannya birokrasi perbankan dan birokrasi peradilan, penyidik mengupayakan dengan cara yang tidak legal agar penanganan tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan ini tidak terhambat.

Upaya ilegal yang dimaksud berupa kerja sama langsung antar penyidik dengan pejabat bank terkait. Kerja sama langsung yang dimaksud berupa pemberian identitas dari nasabah dan transaksi terakhir nasabah. Hambatan selanjutnya yang dialami oleh penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan adalah kurangnya sistem keamanan

dari pihak bank. Sistem keamanan perbankan yang kurang berdampak pada mudahnya seseorang membuka rekening bank.

Upaya yang dilakukan oleh penyidik adalah berkerja sama dengan pihak perbankan dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi tersebut telah dilakukan oleh pihak Polrestabes Surabaya dengan Bank BCA terkait tindak pidana menggunakan jasa perbankan. Sosialisasi itu diharapkan agar pihak perbankan lebih berhati-hati.

Upaya terakhir untuk menangani hambatan yang timbul karena pihak penyidik itu sendiri adalah dengan mempelajari IT melalui modus-modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Mempelajari secara langsung merupakan upaya penyidik agar tidak terhambat. Hal tersebut diungkapkan oleh Bripol Purwo Widodo.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan mengalami beberapa hambatan. Terdapat beberapa hambatan dalam menangani tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan. Hambatan-hambatan dialami oleh penyidik tersebut timbul dari pihak perbankan dan pihak kepolisian itu sendiri. Hambatan yang timbul dari pihak perbankan adalah birokrasi perbankan, hambatan selanjutnya dari pihak bank adalah keamanan pihak bank itu sendiri. Selanjutnya, hambatan yang timbul dari pihak penyidik itu sendiri. Tidak adanya ahli teknologi di Polrestabes terkadang menghambat penanganannya.

Berbagai macam hambatan yang dialami penyidik dalam menangani kasus tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan telah diupayakan oleh pihak penyidik dan pihak bank agar tidak terhambat penanganannya. Upaya dari pihak penyidik atas birokrasi perbankan adalah dengan melakukan upaya ilegal. Upaya ilegal ini dalam

bentuk kerja sama langsung dengan pihak bank tanpa melalui proses yang tertulis dalam Undang-undang perbankan. Upaya untuk hambatan yang timbul dari pihak penyidik itu sendiri adalah tidak adanya ahli teknologi di Polrestabes Surabaya. Belajar secara langsung dalam setiap menangani kasus merupakan upaya yang dilakukan penyidik agar tidak adanya ahli teknologi tidak menghambat.

2. Saran

Penanganan tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan ini sesungguhnya dapat dilaksanakan dengan baik jika ada koordinasi dan kerja sama yang baik antar pihak bank dan penyidik.

Daftar Pustaka

Buku :

Adang, Yesmil, Anwar, **Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung, 2010

Chazawi, Adami, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Bayumedia, Malang, 2010.

Kamsir, **Dasar-dasar Perbankan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Marpaung, Leden, **Proses Penanganan Perkara Pidana : Penyidikan dan Penyidikan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Usman, Rachmadi, **Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Perspektif Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah**, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Widodo, **Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law : Telaan Teoritik dan Bedah Kasus**, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negera Republik Indonesia, Jakarta, 1981.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1958.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/ 19/ PBI/ 2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis

Membuka Rahasia Bank, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3998.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, Diundangkan Di Jakarta Pada Tanggal 30 September 2010.